

Identifikasi Potensi Ekonomi Maritim Provinsi Banten: Model Ekonomi Biru Menggunakan AHP Analysis

Syifa Fajar Maulani

Program Studi Logistik Kelautan, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Lulu Nurmalia

Program Studi Logistik Kelautan, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Rubby Rahman Tsani

Program Studi Logistik Kelautan, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Rohmah Wati

Program Studi Logistik Kelautan, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Ma'ruf

Program Studi Logistik Kelautan, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Fikri Muhammad Mauluddin

Program Studi Logistik Kelautan, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Wibi Ardiansyah

Program Studi Logistik Kelautan, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Susilawati

Program Studi Logistik Kelautan, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Deni Wardana

Program Studi Logistik Kelautan, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Penulis Korespondensi

Syifa Fajar Maulani

syifa.fajar@upi.edu

Article Info

Article History :

Received 08 Jul - 2024

Accepted 18 Oct - 2024

Available Online

15 Dec – 2024

Abstract

This research depicts the development of the maritime economy in Banten Province since its expansion in 2000, focusing on the concept of the blue economy. Although Banten is rich in marine resources, this potential has not been optimally utilized. The Analytical Hierarchy Process (AHP) and Location Quotient (LQ) methods were used to identify potential sectors. The results indicate that the maritime transport sector is the main driver, followed by marine tourism and fisheries. However, only maritime transport is classified as a basic economic sector. To achieve a sustainable blue economy, it is recommended to develop maritime transport infrastructure, promote environmentally friendly marine tourism, and enhance aquaculture technology in the fisheries sector. The government should formulate an integrated development plan emphasizing environmental sustainability and the optimization of maritime potential. With the right strategies, Banten has the potential to become a highly competitive maritime economic hub in Indonesia, strengthening the national economy and ensuring the welfare of the community and environmental sustainability.

Keyword : *Analytic Hierarchy Process (AHP), Blue Economy, Location Quotient (LQ), Maritime Economy*

1. PENDAHULUAN

Pulau Jawa terdiri dari lima Provinsi dengan wilayah yang cukup besar dan penduduk yang cukup padat yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten. Provinsi Banten merupakan provinsi yang paling muda di Pulau Jawa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tanggal 17 Oktober 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten menjadi titik awal dalam kegiatan pembangunan ekonomi sebagai Provinsi yang baru berdiri. Pembentukan Provinsi Banten diresmikan pada tanggal 4 Oktober 2000. Saat pertama kali dibentuk, provinsi ini terdiri atas 4 kabupaten (Serang, Pandeglang, Lebak, dan Tangerang) serta 2 kota yaitu Tangerang dan Cilegon (Basri, 2021).

Usulan pembentukan Banten menjadi provinsi, diawali pada tahun 1950, yang dimana hal itu muncul atas keinginan dan inisiasi masyarakat Banten untuk memisahkan diri dari Jawa Barat. Alasan dari pemekaran wilayah Banten disebabkan oleh tiga hal utama, yaitu ketertinggalan infrastruktur, masalah keterbelakangan pendidikan dan angka kemiskinan yang tinggi. Selain dari ketiga hal tersebut alasan dilakukannya pemekaran pada provinsi Banten yaitu sebagai upaya untuk percepatan kesejahteraan dan mengatasi disparitas dengan Jawa Barat. Sejak itu, Provinsi Banten telah diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam, mengatasi tantangan geografis, dan manajemen keragaman politik serta etnis.

Setelah peraturan mengenai pemekaran Provinsi Banten ini di undangankan menandai langkah penting bagi provinsi ini menuju penyelenggaraan desentralisasi dengan mengalihkan sebagian besar urusan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan insentif fiskal untuk mendukung upaya pembangunan di daerah ini. Meskipun Provinsi Banten telah memiliki otonomi selama hampir dua dekade, tantangannya yang terjadi akan tetap ada. Setiap daerah di Banten memiliki potensi dan tantangan yang berbeda, sehingga kesenjangan antar daerah masih menjadi kenyataan yang perlu diatasi.

Provinsi Banten dikenal dengan julukan "Tanah Jawara", merupakan provinsi yang terletak paling barat Pulau Jawa di antara 5°7'50"-7°1'11" Lintang Selatan dan 105°1'11"-106°7'12" Bujur Timur. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000, luas wilayah Banten yaitu 9.160,70 km² Letaknya yang berbatasan dengan ibukota negara, DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat menjadikan Banten sebagai daerah yang strategis dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Provinsi Banten terdiri dari 4 kota, 4 kabupaten, 155 kecamatan, 313 kelurahan, dan 1.238 desa. Jika ditilik melalui sejarah pemekaran daerah Banten yang terjadi di tahun 2000 menghasilkan 8 (delapan) daerah administrasi yang terdiri dari 4 (empat) kota yaitu, Kota Serang sebagai ibu kota provinsi, Kota Tangerang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang Selatan sedangkan untuk 4 (empat) kabupatennya yaitu, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Provinsi Banten memiliki banyak potensi dari berbagai sektor, hal ini dikarenakan Provinsi Banten memiliki kondisi geografis yang dapat dikatakan lengkap, dari dataran rendah, dataran tinggi, gunung, lembah, hutan, dan lautan ada. Misalnya pada sektor pertanian padi, pada tahun 2022 total luas wilayah panen mencapai 337, 24 ribu hektare, yang diartikan mengalami kenaikan sebesar 18,99 ribu hektar dari tahun 2021. dan untuk produksi padi sendiri pada tahun 2022 mencapai 1,79 juta ton GKG. Selain sektor pertanian, Provinsi Banten juga kaya akan potensi kelautan dan perikanannya, yang dimana Provinsi Banten juga berada di posisi yang dekat dengan Selat Sunda yang menjadi jalur perdagangan nasional dan internasional di Indonesia, sehingga posisi Banten sangat diuntungkan dengan posisi yang sangat strategis. Provinsi Banten memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang melimpah dari berbagai sektor, Banten memiliki luas perairan 11.091.564 KM² dan panjang garis pantai mencapai 499, 62 KM dan mempunyai pulau sebanyak 81 pulau. Dari data Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2022 menunjukkan angka sebesar 67.759,28 ton dengan nilai produksi Rp. 2.24 triliun. Sementara, produksi perikanan budidaya sebesar 111.599,30 ton dengan nilai produksi Rp. 2.49 triliun.

Provinsi Banten memiliki perairan umum yang cukup potensial dikembangkan untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, yaitu sekitar 4.928 Ha, yang terdiri dari cek dam/waduk 621 Ha, situ 320 Ha, rawa 3.416 Ha dan bekas galian pasir 572 Ha. Salah satu tempat potensial yang ada di Banten adalah Karangantu, dan komoditas unggulannya mencakup berbagai jenis ikan seperti ikan tongkol, ikan layang, ikan cakalang, dan ikan tuna. Selain itu, cumi-cumi juga dapat menjadi alternatif pengembangan ekonomi di wilayah Karangantu. Karangantu juga dijadikan sebagai pelabuhan penghubung menuju tempat wisata bahari Pulau Tunda misalnya, pulau tersebut sudah terkenal sebagai daya tarik wisata sejak tahun 1971, karena keindahan nya pulau ini pernah dijadikan sebagai tempat penyutingan film malin kundang yang dimainkan oleh Rano Karno. tak hanya itu karangantu juga memiliki objek wisata yang dikenal dengan sebutan Pantai Gope. Pantai Gope Karangantu merupakan tempat wisata yang dinaungi langsung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang diresmikan pada tahun 2019. Kawasan Pantai ini terletak di Kelurahan Banten merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi ekosistem pesisir dan laut yang menghasilkan sumber daya alam yang produktif, baik untuk keperluan pangan maupun sebagai tujuan pariwisata (Mahendra et al., 2023). Pantai ini memiliki keunggulan diantaranya, mempunyai hutan mangrove, pasar nelayan, pusat jajanan, dan tentu saja dengan hamparan laut dimana tempat para nelayan beraktivitas. Di pantai ini banyak ikan yang bisa ditangkap seperti kakap, ikan kakacangan, kerapu, belanak, dan lain-lain. Di lokasi juga terdapat sentra ikan asin yang berjajar dijemur oleh para nelayan menuju Pantai Gope. Tidak hanya itu, bagi wisatawan yang ingin berkeliling Perairan Banten, banyak nelayan yang akan menawarkan jasa perahu dengan tarif yang terjangkau yaitu Rp.10. 000. Wisatawan tidak hanya bisa memutari Perairan Banten, di pelabuhan ini juga bisa menjadi pelabuhan menuju Pulau Panjang, Pulau Tunda, Pulau Sangiang, Pulau Semut, Pulau Lima, Pulau Empat, dan Pulau Tiga. Meskipun memiliki kekayaan yang melimpah, Provinsi Banten dirasa belum melakukan upaya yang maksimal dalam mengelola berbagai potensi yang ada untuk

meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warganya. Hal ini sejalan menurut (Peoha & Pambudyaningtyas, 2022), pengembangan sektor unggulan di Provinsi Banten belum optimal, sehingga pendapatan per kapita di Provinsi Banten dikategorikan pada pendapatan menengah (*Middle Income*). Dengan demikian peneliti merekomendasikan konsep ekonomi biru untuk diterapkan.

Blue economy pertama kali diperkenalkan oleh Gunter Pauli dalam (Faisyal & Wulandari, 2015). Ekonomi biru merupakan sebuah konsep ekonomi yang bertujuan untuk menjamin keberlanjutan sumber daya pesisir dan laut sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di industri kelautan. Hal ini sejalan dengan pengertian menurut (Darajati, 2023), ekonomi biru didefinisikan sebagai suatu bentuk pendekatan terhadap pembangunan berkelanjutan yang mencakup perhatian khusus pada manfaat dan jasa yang diberikan oleh lingkungan laut kepada masyarakat pesisir, dan pada khususnya negara berkembang dengan pulau-pulau kecil, negara berkembang pada umumnya, dan masyarakat dunia yang rentan dan masih berada di bawah garis kemiskinan.

Konsep ekonomi biru dinilai sebagai solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan kemiskinan yang umum terjadi pada masyarakat pesisir. ekonomi biru dapat dikatakan sebagai bentuk upaya melindungi ekosistem yang ada di laut dan langit dalam pencapaian inklusi bidang ekonomi demi mempertahankan serta menjaga keberlangsungan pembangunan nasional (Latifah et al., 2023). Pemerintah Indonesia telah menyusun strategi penerapan konsep ekonomi biru untuk memulihkan kesehatan laut dan mempercepat pertumbuhan ekonomi kelautan. Provinsi Banten, diadakan lokakarya untuk merancang mekanisme konservasi sumber daya alam dan perikanan berkelanjutan yang dikenal dengan Blue Halo S. Lokakarya tersebut mencakup analisis kebijakan, struktur industri dan pasar, lanskap pembiayaan, investasi ekonomi biru, dan kerentanan. Potensi dan tantangan ekonomi biru dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah dikaji dengan melakukan tinjauan literatur mengenai praktik ekonomi biru. Kajian tersebut mengkaji potensi dan tantangan pada setiap sektor industri kelautan yang dihadapi

pemerintah Indonesia dalam menerapkan konsep ekonomi biru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi biru merupakan isu penting karena lautan yang sehat menyediakan lapangan kerja dan pangan, menopang pertumbuhan ekonomi, mengatur iklim, dan mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir. Konsep ini melibatkan pemanfaatan sumber daya kelautan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Nansi et al., 2024). Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (2022) menyatakan, “Penerapan konsep ekonomi biru sangat penting untuk memanfaatkan sumber daya kelautan.” Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya juga mendukung konsep ekonomi biru sebagai solusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan suatu konsep yang bersifat lebih luas dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya melihat produk domestik bruto yang positif, melainkan masih banyak hal yang dipertimbangkan untuk menyatakan kegiatan pembangunan ekonomi suatu daerah atau suatu negara.

Menurut Beratha dalam (Sahi, 1945) pembangunan adalah usaha perubahan yang dilakukan secara sadar, berencana dan berkesinambungan menuju kearah yang lebih baik. Perubahan tersistem ini pastinya melibatkan berbagai komponen dan merupakan satu rangkaian yang saling berhubungan.

Setiap daerah ataupun negara pasti berupaya agar terjadi Pembangunan ekonomi di wilayahnya, sehingga pertumbuhan ekonomi yang positif akan dirasakan oleh setiap anggota masyarakat.

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses yang dilihat berdasarkan aspek pendapatan per kapita bersih dari suatu negara yang terus meningkat dalam periode yang cukup lama dan mensyaratkan tidak terjadi peningkatan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan absolut, serta distribusi pendapatan tidak timpang di lingkungan masyarakat (Stiglitz, 2000).

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa Pembangunan ekonomi tidak hanya melihat dari sisi kuantitatif saja tapi dari sisi kualitatifnya juga. Dimana Pembangunan ekonomi memang didorong oleh adanya pertumbuhan ekonomi yang positif, namun perlu dipahami bahwa peningkatan kualitas hidup masyarakatnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah tersebut juga menjadi pertimbangan dalam pembangunan ekonomi ini. Pada akhirnya Pembangunan ekonomi menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi namun diikuti dengan perubahan baik dari kesenjangan pendapatan, kemiskinan dan pengangguran.

2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Kuznets dalam (Ma & Wihastuti, 2008) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan pada PDB riil atau PNB.

Produk Domestik Bruto (PDB) Riil adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara (termasuk yang dihasilkan oleh WNI maupun WNA yang melakukan kegiatan ekonomi di wilayah negara Indonesia), pada jangka waktu tertentu biasanya 1 tahun. PDB riil ini dihitung dengan harga konstan atau tidak melihat fluktuasi harga.

Menurut (Waruwu, 2016), salah satu indikator kemajuan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Namun, tidak selamanya pertumbuhan ekonomi yang positif mengartikan Pembangunan ekonomi di suatu daerah.

2.3. Sektor Unggulan

Sektor unggulan dikenal juga dengan sektor kunci perekonomian. Pada setiap negara memiliki sektor unggulannya masing-masing. Sama halnya pada setiap daerahpun memiliki sektor unggulannya masing-masing. Indonesia sendiri memiliki 12 sektor unggulan. Menurut (Mukhyi, 2013) kedua belas sektor unggulan tersebut terdiri dari

- 1) Sektor Perdagangan
- 2) Industri Kimia
- 3) Industri Pupuk dan Pestisida,
- 4) Jasa lainnya

- 5) Bangunan,
- 6) Industri Mesin, alat-alat dan perlengkapan listrik,
- 7) Industri Makanan Lainnya,
- 8) Angkutan darat,
- 9) Listrik, gas, dan air bersih,
- 10) Industri barang karet dan plastic,
- 11) Peternakan,
- 12) Industri kertas, barang dari kertas dan karton

Suatu sektor dikatakan unggul di tingkat Internasional apabila sektor tersebut dapat menyaingi negara lainnya (Shinta Iffah Rosyidah, 2022). Sedangkan, pada tingkat nasional, suatu sektor dikatakan unggul, apabila dapat menyaingi daerah lainnya. (Suyanto, 2016).

2.4. Ekonomi Maritim

Ekonomi maritim merupakan salah satu sektor ekonomi yang berfokus pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan lautan maupun pesisir. Seperti yang disampaikan oleh (Purwanto, 2014) Ekonomi Maritim merujuk pada sektor ekonomi yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan aktivitas yang terjadi di sekitar wilayah laut dan pesisir. Ini mencakup berbagai kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan perairan, seperti perikanan, aquaculture, pariwisata bahari, perdagangan maritim, transportasi laut, industri galangan kapal, eksplorasi dan produksi energi terbarukan di perairan, serta infrastruktur dan layanan pendukung maritim

Dalam konteks yang lebih luas, pengelolaan ekonomi maritim melibatkan kerja sama dan kolaborasi antar negara untuk mengelola sumber daya kelautan, perdagangan internasional, menegakkan hukum maritim, dan keamanan laut (Zulkifli et al., 2023).

2.5. Ekonomi Biru

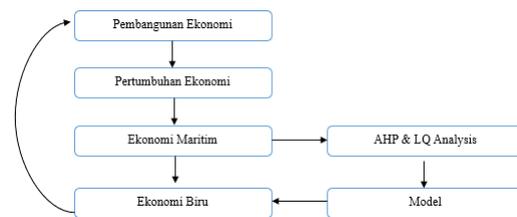
Ekonomi biru adalah kegiatan ekonomi yang terjadi di pesisir laut dan sekitarnya. Sektor-sektor yang mencakup ekonomi biru terdiri dari akuakultur dan perikanan tangkap, bioteknologi kelautan, pengolahan hasil laut, transportasi laut, sumber daya energi dan material, industry maritim dan jasa, sumber daya pulau-pulau kecil, dan pariwisata Bahari. (Rahim, A., Hastuti, D. R. D., & Malik, A., 2024)

Selaras dengan yang disampaikan oleh (Maulani et al., 2022), konsep ekonomi biru berfokus pada industri kelautan, perikanan maupun maritim yang dilakukan secara bertanggungjawab atas segala penggunaan sumber daya hayati didalam maupun sekitarnya, sehingga semua yang ada di alam dapat digunakan saat ini maupun di masa depan atau dikenal dengan istilah berkelanjutan.

Dapat dipahami bahwa ekonomi biru bukan sekedar mengambil dan memanfaatkan apa yang tersedia dari alam, mealinkan bagaimana menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut, dan ekonomi masyarakat bisa terus bertumbuh. Dengan kata lain konsep ekonomi biru merupakan konsep Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

2.6. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pemaparan kajian berbagai konsep di atas, dapat dituangkan ke dalam kerangka pemikiran yang menjadi arah dalam penelitian ini pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Pada gambar kerangka pemikiran di atas dijelaskan bahwa indikatora dari Pembangunan ekonomi suatu daerah atau negara dengan melihat dari pertumbuhan ekonominya. Pada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut maka akan diteliti mengenai sektor ekonomi maritim yang ada. Setelah itu sektor ekonomi maritim tersebut akan dinilai oleh seorang yang ahli di bidangnya dengan menyediakan kuesioner. Lalu informasi yang diterima dari hasil pengisian kuesioner tersebut diolah menggunakan AHP Analysis. Didapatlah sektor-sektor ekonomi maritim. Lalu dinilai menggunakan LQ analysis untuk dipilih dari sektor ekonomi maritim tersebut yang potensial dan dapat diterapkan dalam model ekonomi biru. Setelah ada model yang terpilih, maka dapat diterapkan dalam strategi Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian campuran (Mix Method Research/MMR) dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian campuran ini merupakan metode yang menggabungkan antara kualitatif, dan kuantitatif yang digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian. Keuntungan yang diperoleh menggunakan metode ini adalah data yang didapatkan dan dihasilkan lebih komprehensif, valid, reliable dan objektif (Sugiyono, 2013).

Pendekatan studi kasus dinilai paling sesuai dengan sifat eksploratif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan wawasan yang kaya dan beragam mengenai bagaimana implementasi dari kebijakan dan peraturan pemerintah terkait, serta faktor-faktor ekonomi-politik di dunia nyata yang mempengaruhi praktiknya.

Dalam melakukan penelitian, diperlukan adanya pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian. Hal ini tertuang di dalam alur penelitian. Adapun alur penelitian ini tertuang pada gambar 1 di bawah ini:



Gambar 2. Alur Analisis

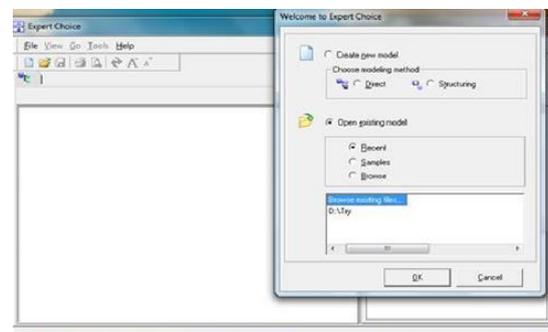
Sumber: diolah oleh peneliti

AHP analysis menurut Taylor dalam (Nugroho, 2021) merupakan metode yang digunakan untuk memeringkat alternatif keputusan, lalu berdasarkan peringkat tersebut dapat dipilih yang terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Pada metode ini disediakan nilai numerik

dalam memeringkat alternatif keputusan, dimana peringkat dihasilkan pertimbangan alternatif yang paling memenuhi kriteria. Sedangkan, dari Wibisono (2006), AHP merupakan alat bantu yang sederhana dalam rangka mengambil keputusan, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang tidak terstruktur, kompleks, bahkan multi atribut. Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa metode penelitian yang berfokus menentukan pilihan berdasarkan kriteria-kriteria dan alternatif-alternatif dikenal dengan AHP analysis. Penentuan kriteria-kriteria dan alternatif-alternatif dilakukan bisa berdasarkan teori-teori, peraturan perundang-undangan ataupun peraturan pemerintah yang disajikan oleh peneliti dalam sebuah kuesioner.

Pada penelitian ini data hasil responden yang didapat dari kuesioner diolah menggunakan salah satu decision maker program yang dapat diinstal di laptop maupun PC (Personal computer). Program tersebut dapat menghitung pilihan yang tepat dari kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Salah satu program komputer yang dapat mendukung AHP Analysis adalah dengan menggunakan Expert Choice Versi 11. Untuk dapat menggunakan program ini, peneliti perlu mendownload program ini terlebih dahulu. Setelah program terinstall, ada beberapa tahapan dalam melakukan analisa AHP menggunakan expert choice versi 11, yaitu sebagai berikut:

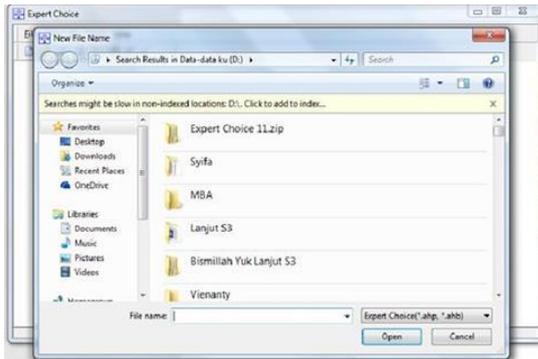
1. Membuat new file terlebih dahulu dengan mengklik “Create new model”, namun apabila hendak membuka file yang pernah dibuat bisa memilih “open existingmodel”.



Gambar 3. Tampilan awal file

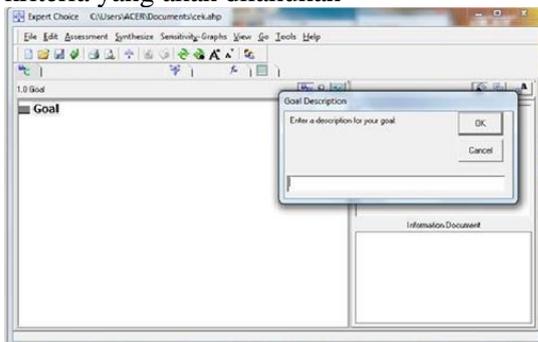
Sumber: Expert Choice Versi 11

2. Memberi nama file yang baru akan dibuat

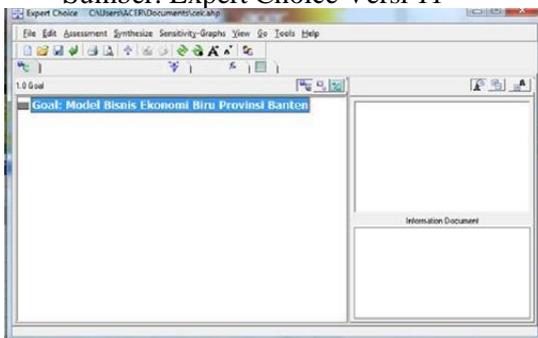


Gambar 4. Tampilan nama file
Sumber: Expert Choice Versi 11

- Menentukan goal (tujuan) dari pemilihan kriteria yang akan dilakukan

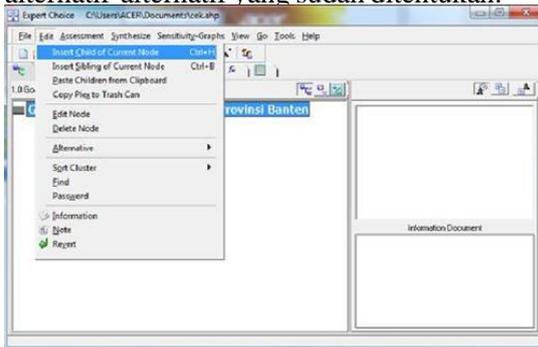


Gambar 5. Pemilihan Kriteria
Sumber: Expert Choice Versi 11

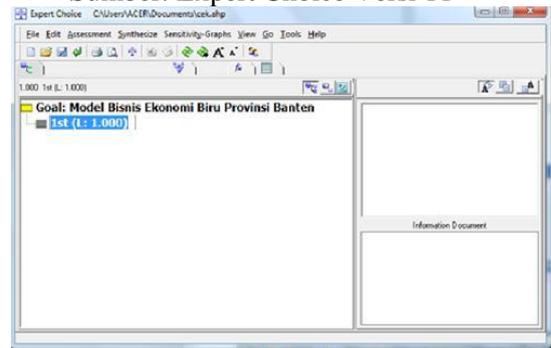


Gambar 6. Penentuan Goal
Sumber: Expert Choice Versi 11

- Menginput alternatif-alternatif yang akan dinilai oleh responden dan dianalisa mana yang lebih tinggi nilainya dengan menyorot menu "Edit", lalu klik "Insert child of current node", dan tuliskan alternatif-alternatif yang sudah ditentukan.

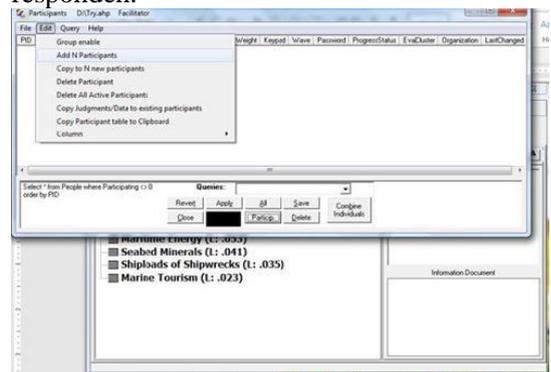


Gambar 7. Insert Child of Current Node
Sumber: Expert Choice Versi 11



Gambar 8. Input Alternatif Yang Telah Ditentukan
Sumber: Expert Choice Versi 11

- Setelah selesai menginput seluruh kriteria, maka berikutnya adalah menentukan berapa banyak partisipan yang akan mengisi. Dengan mengklik "edit" lalu pilih "Add N participant" lalu akan muncul kotak dialog yang dapat kita input jumlah partisipannya. Setelah itu program siap digunakan untuk menginput hasil responden.



Gambar 9. Menentukan banyaknya partisipan
Sumber: Expert Choice Versi 11

AHP analysis pada penelitian ini merupakan bagian dari metode penelitian kualitatif. Setelah data yang didapatkan dari kuesioner di olah menggunakan program AHP, maka Langkah berikutnya masuk pada tahap penelitian kuantitatif pada penelitian ini yaitu melakukan *Analisis LQ-Multiplier Effect*. Untuk menghitung Analisa LQ diperlukan data berupa angka diperoleh dari data time series pada periode 2017-2022. Data tersebut didapatkan dari data statistik provinsi Banten dalam angka dan sumber pendukung lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui sektor-sektor yang dapat dikembangkan di Provinsi Banten.

Berikut Langkah-langkah dalam melakukan *Analisis LQ-Multiplier Effect* :

1). Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis LQ digunakan sebagai alat untuk mengetahui sektor yang dipilih dan nantinya dikembangkan dalam konsep ekonomi biru apakah merupakan sektor unggulan dalam PDRB Banten selama periode 2017-2022. Adapun rumusan perhitungannya adalah:

$$LQ_i = \frac{\left(\frac{T_i}{T_t}\right)}{\left(\frac{V_i}{V_t}\right)}$$

Dimana:

LQ = Hasil Bagi Lokasi

T_i = Produk Sektor yang dipilih untuk dikembangkan melalui konsep Ekonomi Biru

T_t = Produk Domestik Bruto Wilayah Provinsi Banten

V_i = Pendapatan sektor yang dipilih untuk dikembangkan dengan konsep Ekonomi Biru dalam skala nasional

V_t = Produk Domestik Bruto Kriteria penilaian:

Jenis-jenis interpretasi hasil perhitungan LQ:

a. LQ > 1

Sektor yang dimaksud memang sektor unggulan di daerah tersebut dan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian di daerah. Produksi lokal memiliki nilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata kemurnian wilayah acuan (peneliti menyebut dengan “sektor inti”).

b. LQ < 1 :

Sektor yang dimaksud bukan merupakan sektor unggulan dan potensi yang dikembangkanpun kurang sebagai fungsinya yaitu penggerak perekonomian Indonesia. Produksi lokal relatif memiliki nilai lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata produksi di wilayah acuan (peneliti menyebut dengan “sektor non-inti”).

Digunakannya pendekatan ini untuk menentukan sektor yang memiliki potensi terbaik jika dibandingkan dengan sektor lainnya untuk dikembangkan dengan konsep Ekonomi Biru.

2). Multiplier Effect (Efek Pengganda Efek)

Metode ini dihitung dengan menggunakan persamaan:

Dimana,

BE_{ir} = hasil bagi lokasi di sektor tersebut

LQ₁ = lapangan kerja dasar di sektor i di wilayah r

E_{ir} = daerah acuan ketenagakerjaan di sektor i di wilayah r

Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana menciptakan lapangan kerja pada sektor unggulan meskipun terdapat aktivitas tenaga kerja pada sektor yang kurang unggul (Depkes, 2013). Terjadinya multiplier effect terhadap perekonomian di seluruh wilayah disebabkan oleh adanya peningkatan sektor basis. (J. Glasson, 1977). Peningkatan aktivitas di sektor basis turut meningkatkan aliran pendapatan ke daerah, sehingga permintaan barang dan jasa ataupun aktivitas perekonomian di sektor tersebut semakin bertambah. Meningkatnya aliran pendapatan serta konsumsi dan investasi yang juga tumbuh, berdampak pada pendapatan masyarakat lokal dan lapangan kerja (Kadariah, 1985).

Berikut rumus Multiplier Effect dalam jangka pendek:

$$MSy = \frac{\Delta Y}{\Delta Yb}$$

Dimana,

MS_y = koefisien pengganda jangka pendek untuk indikator pendapatan

y_Y = perubahan pendapatan Provinsi Banten

y_{Yb} = perubahan penerimaan sektor unggulan/sektor dasar Provinsi Banten

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. AHP Analysis Pada Sektor Ekonomi Maritim di Provinsi Banten

Langkah pertama dalam alur penelitian ini adalah menganalisa terlebih dahulu sektor-sektor ekonomi maritim yang sudah berjalan dan dapat dikembangkan dengan konsep ekonomi biru di wilayah provinsi Banten. Sektor-sektor ekonomi tersebut sudah sesuai dengan apa yang sudah KKP publikasikan mengenai sektor ekonomi potensial yang dapat diterapkan dalam konsep ekonomi biru yang berjumlah sembilan sektor. Sembilan sektor tersebut terdiri dari transportasi laut, industry maritim, industry garam, pemanfaatan perairan laut dalam, energi maritim, mineral dasar laut, muatan kapal karam, wisata Bahari, dan perikanan.

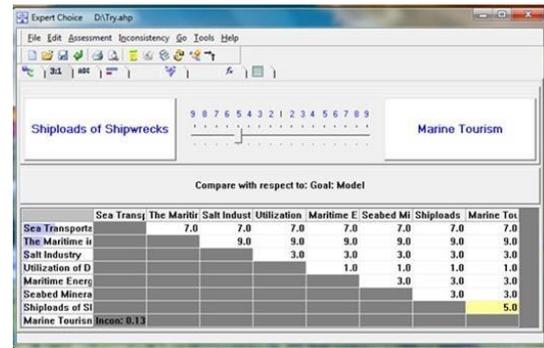
Kesembilan sektor tersebut dimasukkan ke dalam kuesioner sebagai alternatif dalam AHP Analysis, lalu dinilai oleh orang-orang yang ahli di bidang ekonomi biru, maupun di

bidang pemerintahan sebagai pengambil Keputusan dalam pembuatan peraturan di suatu wilayah administrasi yang dipimpinnya. Jumlah responden kali ini sebanyak lima orang. Pada penelitian AHP analysis ini memang tidak memerlukan terlalu banyak responden, namun yang terpenting responden yang mengisi adalah orang-orang yang betul paham dan ahli di bidangnya, serta memiliki kuasa dalam pengambilan Keputusan.

Sesuai dengan pemaparan pada bagian metode penelitian, proses Analisa penelitian ini menggunakan alat berupa program komputer yang memang baik digunakan dalam Analisa AHP, yaitu Expert Choice versi 11. Dengan menggunakan program komputer ini, pengolahan data lebih singkat dengan angka yang akurat. Kesembilan sektor ekonomi tersebut akan dinilai berdasarkan beberapa kriteria untuk ekonomi biru yaitu sebagai berikut:

- 1) Sektor ekonomi tersebut memang ada dan berkontribusi pada PDRB Provinsi Banten, meskipun nilainya belum terlalu besar.
- 2) Aspek Alam dan lingkungan hidup dapat tetap terjaga keberlanjutannya, meskipun sektor ekonomi ini tetap berjalan.
- 3) Menggerakkan perekonomian Masyarakat sekitar.

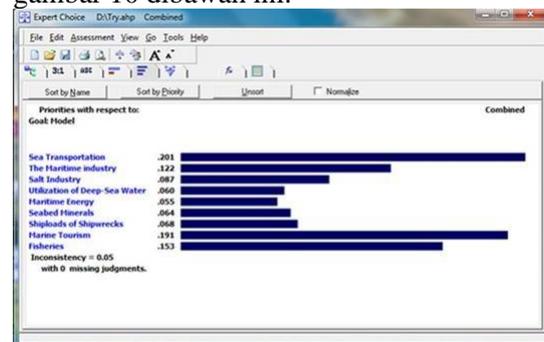
Setelah ditentukan kriteria dan alternatif, maka responden dapat menilai sektor mana yang berpotensi diterapkan dalam model ekonomi biru. Setelah data dari responden lengkap, dilakukanlah kegiatan penginputan pada program komputer tersebut. Dalam kegiatan penginputan hasil dari responden, peneliti harus teliti jangan sampai salah menginput. Penilaian AHP analysis ini akan membandingkan satu alternatif dengan alternatif lainnya. Adapun kriteria penilaian terdiri dari Extreme=9 poin, Very strong = 7 poin, Strong= 5 poin, Moderate = 3 poin, dan Less = 1 poin. Namun, yang perlu diperhatikan dalam AHP Analysis adalah nilai inkonsistensi yang sebaiknya tidak melebihi dari 0,1. Apalagi sudah bernilai 0,2 keatas, sebaiknya gunakan sumber responden lainnya, karena jika responden inkonsisten, hasil bisa menjadi bias. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 9 dibawah ini.



Gambar 9. Input Alternatif Yang Telah Ditentukan

Sumber: Diolah oleh penulis (2023)

Setelah terinput semua, maka hasil dari setiap responden atau partisipan akan dikombinasikan menjadi satu kesimpulan yaitu berupa nilai dari masing-masing sektor. Adapun nilai-nilai dari masing-masing sektor ekonomi, dengan partisipan yang sudah dikombinasikan pada penelitian terdapat pada gambar 10 dibawah ini.



Gambar 10. Hasil AHP Analysis Sektor Ekonomi Maritim Untuk Diterapkan Pada Model Ekonomi Biru di Provinsi Banten

Sumber: Diolah oleh penulis (2023)

Pada gambar 10. Menunjukkan hasil perhitungan AHP Analysis. Perolehan nilai tertinggi diduduki oleh Sea Transportation dengan skor 0,201. Tidak berbeda jauh dengan sea transportation, sektor ekonomi yang menduduki peringkat kedua adalah marine tourism dengan skor 0,191 ; diikuti oleh sektor perikanan sebesar 0,153 ; the maritime industry 0,122 ; salt industry 0,87 ; shipload of shipwrecks 0,68 ; seabed minerals 0,64 ; utilization of deep-sea water 0,60 ; dan maritime energy sebesar 0,55. Rasio konsistensi (Consistency Ratio) kombinasi dari seluruh jawaban participant sebesar 0,05. Jika nilai CR di bawah 0,1 maka model dinyatakan konsiten, dan hasil perhitungan AHP Analysis ini diterima dan dapat dilanjutkan dengan pendekatan berikutnya.

Dari hasil AHP analysis tersebut kita ketahui bahwa sektor ekonomi maritim di Provinsi Banten yang dapat diterapkan menjadi model ekonomi biru memiliki tiga sektor unggulan yaitu transportasi laut, wisata bahari dan perikanan. Sektor transportasi laut menjadi sektor yang memang kegiatannya cukup banyak di provinsi Banten. Hal ini ditunjang dengan letak geografis Banten yang ada di ujung pulau Jawa bagian Barat, menjadikannya jalur perlintasan ke pulau lainnya yang berada di wilayah Barat Indonesia. Wisata Bahari di Provinsi Banten juga merupakan bagian yang melekat di wilayah ini, karena sepanjang perbatasan dibagian utara, barat, dan Selatan provinsi ini hampir Sebagian besar dikelilingi oleh wilayah laut. Selain itu banyak Pantai dan pulau yang dapat dijadikan destinasi wisata di provinsi ini. Sektor perikanan di provinsi ini sangat didukung dengan adanya Pelabuhan Perikanan Nusantara yang berada di wilayah karang antu.

Ketiga sektor ini akan diteliti lebih lanjut dengan Analisa LQ untuk mengetahui nilai signifikansinya pada perekonomian provinsi ini, apakah sektor ekonomi tersebut merupakan benar-benar sektor ekonomi unggulan atau bukan.

4.2. Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis Location Quotient (LQ) biasanya digunakan untuk menentukan komoditas atau sektor unggulan disuatu daerah. Menghitung LQ dapat dilakukan dengan cara membagi nilai PDRB Tingkat daerah dengan Tingkat nasional. Pada bagian pembilang diisi dengan angka dari PDRB pada sektor "X" di provinsi Banten dibagi dengan total PDRB di provinsi Banten, sedangkan dibagian penyebut diinputkan nilai PDRB Tingkat nasional pada sektor "X" dibagi total PDRB Tingkat nasional. Hasil dari perhitungan LQ analysis menunjukan sektor ekonomi yang basis dan non-basis. Jika hasil perhitungan $LQ > 1$ maka sektor ekonomi "x" di provinsi tersebut merupakan sektor ekonomi basis. Jika hasil $LQ < 1$ maka sektor ekonomi tersebut adalah sektor non-basis.

Dalam teori basis ekonomi, diyakini pertumbuhan ekonomi suatu daerah pastinya akan berhubungan langsung dengan permintaan dari luar daerah baik berupa barang maupun jasa (Arsyad, 2002:116). Teori basis ini membagi sektor ekonomi

menjadi ke dalam dua kelompok yaitu sektor ekonomi basis dan non-basis (Mahardianingtyas et al., 2019). Kegiatan sektor basis merupakan penggerak utama perekonomian suatu daerah (Jaya, 2022). Pada sektor ekonomi basis, pemenuhan permintaan barang dan jasa dapat dilakukan sampai ke luar daerah utamanya. Artinya daerah utamanya dari segi kuantitas kebutuhan sudah terpenuhi, sehingga sektor ini dapat berekspansi ke wilayah di luar sektore ekonomi tersebut. Apabila nilai sektor basis ini semakin besar, maka peran sektor tersebut semakin besar sebagai salah satu penggerak perkonomian di daerah tersebut.

Di sisi lain, apabila terjadi perubahan dalam sektor basis ini baik perubahan negatif maupun positif, maka menimbulkan multiplier effect (efek berganda) dalam perekonomian regional tersebut. Sedangkan sektor ekonomi non-basis merupakan sektor yang hanya bisa menyediakan barang dan jasa hanya untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat daerah perekonomiannya saja atau hanya dapat memenuhi kebutuhan regionalnya saja. Selain itu, pemasaran terhadap produk barang dan jasa ini masih lingkup lokal.

Sesuai dengan hasil dari AHP Analysis, maka pada perhitungan LQ analysis ini hanya berfokus pada tiga sektor ekonomi saja di Provinsi Banten, selama tiga tahun ke belakang. Meskipun data di PDRB sektor perikanan masih tercampur dengan pertanian, sektor transportasinya masih umum tidak hanya nilai transportasi laut, dan sektor wisata Bahari terwakili oleh sektor jasa lainnya yang meliputi subsector seni, hiburan dan rekreasi. Untuk lebih menguatkan sektor wisata maka dihitung juga sektor akomodasi, makanan dan minuman. Karena kegiatan wisata tidak akan terlepas dari hal-hal tersebut. Perhitungan LQ analysis diolah dalam MS. Excel, dan hasilnya ditampilkan pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. LQ Analysis pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut (Lapangan Usaha (Triliun Rupiah)

Lapangan Usaha di Provinsi Banten	Harga			Lapangan Usaha di Indonesia	Harga			LQ Analysis			Rata-rata LQ
	2020	2021	2022		2020	2021	2022	2020	2021	2022	
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	39,00	40,20	44,05	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	211,0	225,0	242,0	0,44	0,44	0,45	0,44
Transportasi dan Pergudangan	40,46	41,69	71,17	Transportasi dan Pergudangan	689,50	719,60	983,50	1,40	1,42	1,81	1,54
Penyedia Akomodasi dan Makanan Minum	15,15	15,89	17,45	Penyedia Akomodasi dan Makanan Minum	394,00	412,30	472,10	0,91	0,94	0,93	0,93
Jasa lainnya	10,86	11,16	12,16	Jasa lainnya	302,60	312,20	354,20	0,85	0,87	0,86	0,86
Total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	625,90	665,89	747,25	Total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	14879,70	16288,80	18730,40				

Sumber: Data diolah oleh penulis (2023)

Berdasarkan hasil perhitungan LQ analysis diatas dari empat sektor yang dihitung, kita melihat ada satu sektor yang nilai LQ nya lebih dari 1. Sedangkan sektor ekonomi lainnya, nilainya ada di bawah 1 artinya ketiga sektor tersebut adalah sektor ekonomi non-basis. Sektor ekonomi yang mendapatkan nilai lebih dari satu adalah sektor transportasi dan pergudangan dengan angka perolehan sebesar 1,54. Disusul dengan sektor penyedia akomodasi dan makan minum dengan nilai 0,93. Sedangkan jasa lainnya bernilai 0,86, dan yang paling rendah adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang hanya bernilai 0,44. Tentunya dari sektor kemaritiman ini pemerintah provinsi Banten perlu Menyusun strategi yang tepat agar sektor ekonomi basis semakin meningkat, dan sektor ekonomi yang saat ini masih menjadi non-basis bisa segera berubah menjadi basis.

4.3. Perencanaan Pembangunan Dalam Model Ekonomi Biru

Ekonomi biru merupakan salah satu konsep dari pembangunan yang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan utamanya adalah sumber daya laut (Syifa, 2022). Paradigma ekonomi biru sebetulnya sudah mulai coba diterapkan oleh Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP) yang dimulai pada tahun 2013. Dalam menjalankan model ekonomi biru perlu dipahami bahwa lingkungan alam merupakan hal utama yang pertama kali perlu diperhatikan sebelum menjalankan sebuah ekonomi. Selama ini dalam menjalankan ekonomi konvensional, manusia terbiasa mengambil dan memanfaatkan semua yang ada di alam tanpa mempertimbangkan

bagaimana dampaknya terhadap alam. Sedangkan di konsep ekonomi biru ini adalah konsep ekonomi yang berpikir selayaknya alam semesta dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya. Seperti alur ekosistem tidak ada istilah “sisa” atau hal yang terbuang dari rantai makanan. Model ekonomi biru mencoba menerapkan hal tersebut dengan memutarakan kegiatan perekonomian yang sudah biasa terjadi menjadi perekonomian yang tanpa banyak meninggalkan sisa. Dari berbagai pemaparan diatas dapat dipahami bahwa model ekonomi biru ini adalah model ekonomi yang memastikan lingkungan tetap terjaga/Lestari (langit dan laut tetap biru), namun Masyarakat tetap Sejahtera.

Selain itu, ekonomi biru juga jika dilihat dari pandangan bank dunia dan pemerintah Indonesia, ekonomi biru ini sangat erat kaitannya dengan ekonomi kelautan dan kemaritiman. Sesuai dengan strategi penerapan ekonomi biru yang sudah disusun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu (1) Memperluas wilayah konservasi laut dalam rangka perlindungan habitat dan penyerapan karbon, (2) Penangkapan ikan terukur berbasis kuota untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan kesejahteraan nelayan, (3) Pengembangan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan untuk mengurangi penangkapan ikan, (4) Pengawasan dan pengendalian Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan (5) pembersihan sampah laut melalui gerakan bulan cinta laut, Dimana dalam 1 bulan dari setahun nelayan hanya focus mencari sampah di laut tidak menangkap ikan. Sejalan dengan strategi model ekonomi biru yang dicanangkan oleh KKP, pemerintah Provinsi Banten pun dapat menyusun strategi yang mengarah pada yang dicanangkan oleh pemerintah pusat disesuaikan dengan sektor ekonomi basis dan non-basis yang memiliki potensi berdasarkan Analisa AHP dan LQ analysis.

Dari hasil perhitungan Analisa AHP dan LQ analysis, dapat dipahami bahwa apabila pemerintah provinsi Banten ingin pertumbuhan ekonominya semakin pesat, maka sektor transportasinya, terutama transportasi laut perlu didukung lebih lagi, sehingga sektor ini semakin maju dan berkembang, yang nantinya akan memberikan multiplier effect bagi masyarakat di wilayah

provinsi Banten juga. Dengan semakin banyak nya lapangan tenaga kerja yang terbuka di sektor ini. Potensi pada sektor transportasi laut di wilayah provinsi Banten terlihat jelas dari data kunjungan kapal pada tahun 2019 sebanyak 13.903 kapal, dan pada tahun 2020 meningkat sampai 18.066 kapal (BPS, 2020).

Pada kegiatan transportasi laut dan pergudangan merupakan sektor padat karya juga, karena untuk bisa mengelola kegiatan transportasi laut tidak hanya membutuhkan nahkoda saja untuk berlayar, tapi dibutuhkan pula pegawai-pegawai yang mengelola kegiatan kepelabuhanan dan pelayaran. Seperti dibutuhkannya orang untuk mengatur kapal keluar dan masuk kolam Pelabuhan, orang yang melakukan kegiatan bongkar muat, orang yang mendata barang masuk dan keluar transportasi laut, dan masih banyak hal-hal lainnya.

Namun, yang perlu diingat bahwa semakin meningkatnya jumlah kapal yang bergerak disuatu wilayah, tidak dapat dipungkiri emisi gas NOX yang dihasilkan oleh kapalpun akan semakin meningkat. Oleh karena itu, International Maritime Organisation (IMO) menetapkan regulasi Maritime Pollution (MARPOL) Annex VI yang peraturannya berisi tentang batas maksimum kadar NOX sebesar 12,51 g/Kwh. Kadar NOX dihitung dengan membagi jumlah emisi NOX yang dihasilkan dengan rata-rata daya yang digunakan.

Selain itu, saat ini juga sudah mulai ada NGO yang focus pada isu blue carbon ini. Mereka menyediakan jasa untuk para Perusahaan pelayaran khususnya yang mau ikut bergerak menjaga lingkungan sehingga Perusahaan-perusahaan tersebut nantinya akan mendapatkan sertifikat zero carbon. Biasanya Perusahaan akan memberikan biaya untuk pelestarian lingkungan, dan biaya tersebut digunakan oleh NGO untuk melakukan penanaman mangrove bersama warga sekitar, dimana warga yang mengikuti kegiatan ini akan diberi upah. Tidak sampai disitu NGO ini memberikan pelatihan bagi Masyarakat untuk dapat mengelola mangrove menjadi barang yang bernilai jual, ada yang dijadikan sabun, sirup, maupun pewarna tekstil. Konsep ini apabila digerakkan juga oleh pemerintah pastinya akan berdampak lebih besar lagi bagi alam dan masyarakat. Di sisi lain meskipun sektor jasa lainnya serta

sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman, yang mewakili wisata Bahari belum menjadi sektor basis, namun angka mereka ini menuju ke angka 1. Maka pada kedua sektor ini pemerintah provinsi Banten perlu mengenalkan lagi agar wisata Bahari provinsi Banten dapat lebih dikenal lagi oleh orang luar. Selain itu, perlunya didukung dengan infrastruktur (jalan) yang nyaman, aman dan mudah diakses oleh masyarakat umum untuk datang ke wisata Bahari, dan tersedianya fasilitas umum seperti toilet, tempat ibadah di wilayah wisata tersebut. Untuk memastikan wisata Bahari masuk ke dalam kerangka ekonomi biru, maka konsep wisata yang ditawarkan adalah konsep wisata yang menjaga kelestarian lingkungan, bukan datang berwisata hanya untuk merusak dengan meninggalkan sampah sisa kegiatan wisata. Misalnya wisata konservasi mangrove dan penanaman terumbu karang. Sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Konservasi itu menjadi kunci di mana Ekonomi Biru (Saddington, 2023).

Sektor pertanian, perikanan meskipun nilai LQ analisisnya masih berada di bawah jauh dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, tetap bisa menjadi penggerak perekonomian lokalnya terlebih dahulu. Berdasarkan hasil observasi peneliti ke PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara) Karang Antu, provinsi Banten, sebetulnya untuk sektor perikanan sudah cukup terkelola dengan baik dengan adanya PPN di wilayah Banten, namun memang hasil tangkap yang masih belum terlalu stabil, terkadang membuat para nelayan menyewakan kapalnya untuk kegiatan wisata di weekend. Para nelayan dari Pulau Tunda datang ke wilayah Karang Antu dan menawarkan jasa keliling pulau agar ekonomi keluarga nelayan tetap berjalan. Kedepannya pemerintah dapat bekerjasama dengan para peneliti dari berbagai lembaga untuk memaksimalkan hasil tangkap ikannya, maupun bekerjasama dalam bidang teknologi *acquaculture* (budidaya perikanan). keterbatasan penelitian dan penelitian lanjutan yang mungkin untuk dilakukan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menggambarkan perjalanan pembangunan Provinsi Banten, khususnya dalam konteks ekonomi maritim. Sejak

pemekarannya pada tahun 2000, provinsi ini terus berupaya mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang menjadi landasan bagi konsep ekonomi biru. Metode Analisis Hirarki Proses (AHP) dan Location Quotient (LQ) digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi besar dalam mewujudkan konsep ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor transportasi laut menjadi pendorong utama dalam model ekonomi biru Provinsi Banten. Diikuti oleh wisata bahari dan sektor perikanan, sektor-sektor ini menunjukkan potensi besar dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah ini. Namun, dari hasil analisis LQ, hanya sektor transportasi laut yang memiliki status sebagai sektor ekonomi basis, sementara sektor lainnya masih berada di tingkat non-basis.

Untuk mewujudkan model ekonomi biru yang berkelanjutan, beberapa rekomendasi dapat diambil. Pertama, fokus utama perlu diberikan pada pengembangan sektor transportasi laut dengan meningkatkan infrastruktur dan layanan terkait. Kedua, sektor wisata bahari memerlukan promosi intensif sambil menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan fasilitas wisata. Ketiga, sektor perikanan, meskipun bukan sektor basis, tetap memerlukan perhatian khusus dengan pengembangan teknologi aquaculture dan kolaborasi dengan peneliti untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan serta pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Banten juga harus menyusun rencana pembangunan yang terintegrasi, memastikan keberlanjutan lingkungan, dan mengoptimalkan potensi ekonomi maritim. Konsep ekonomi biru harus menjadi pedoman dalam setiap langkah pembangunan ekonomi provinsi, dengan menjaga keberlanjutan lingkungan sambil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan implementasi strategi yang tepat dan konsisten, Provinsi Banten memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi maritim yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di Indonesia. Langkah-langkah ini akan membantu memperkuat kontribusi provinsi ini dalam pertumbuhan ekonomi nasional sambil menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

6. REFERENSI

- Basri, S. (2021). *Tinjauan Kritis Pemekaran Daerah : Pembentukan 8 Provinsi Baru*. April.
- Darajati, M. R. (2023). Ekonomi Biru: Peluang Implementasi Regulasi Di Indonesia. *The Journalish: Social and Government*, 4(5), 41–53. <https://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/599>
- Faisyal, R., & Wulandari, C. (2015). Motivasi Indonesia Dalam Menerapkan Model Kebijakan Blue Economy Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal Transnasional*, 7(1), 1914–1928. <https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/3189%0Ahttps://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/download/3189/3105>
- Jaya, A. H. (2022). Analisis sektor-sektor basis dan non basis perekonomian wilayah Kabupaten Banggai tahun 2014-2018. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2), 481. <https://doi.org/10.29210/020221568>
- Latifah, E., Abdullah, R., & Kendari, U. M. (2023). *PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH : PERAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE*. 2(01), 1–22.
- Ma, A., & Wihastuti, L. (2008). *PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA : Determinan dan Prospeknya*. 9(April), 44–55.
- Mahardianingtyas, S., Adhetiya Safitri, D., & Agustio, A. (2019). *A Blue Economy for Better Economic Development: A Case Study of East Nusa Tenggara, Indonesia*. 89(Apbec 2018), 165–173. <https://doi.org/10.2991/apbec-18.2019.22>
- Mahendra, Y., Asfar, A. H., Ainulhaq, N., Pratiwi, I., Quraysin, I., Riyanto, A., Fadillah, S. N., & Rohmah, S. (2023). Pemanfaatan Limbah Cangkang Kerang Sebagai Alternatif Pembuatan Kerajinan Cenderamata Wisata Pantai Gope Karangantu Banten. *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti*, 4(4), 744–758. <https://doi.org/10.38048/jailcb.v4i4.2275>
- Maulani, S. F., Tsani, R. R., Tinambunan, R. C. H., & Mauluddin, F. M. (2022). Tren

- Penelitian Studi Ekonomi Biru: Tinjauan Sistematis Satu Dekade. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(3), 1284–1294.
- Mukhyi, L. I. & M. A. (2013). *SEKTOR UNGGULAN PEREKONOMIAN INDONESIA: PENDEKATAN INPUT-OUTPUT*. 5, 8–9.
- Nansi, M. R., Natalia, M. E., & Rohman, N. R. (2024). Pemulihan Ekonomi Biru Indonesia Pasca Pandemi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 6992–7001. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5549>
- Nugroho, A. (2021). Implementasi Metode Analytical Hierarchy Process (Ahp) Terhadap Penerimaan Beasiswa Berprestasi Di Mts Walisongo Sidwangi. *Information System Journal*, 3(2), 1–5. <https://doi.org/10.24076/infosjournal.2020v3i2.424>
- Peoha, S. G., & Pambudyaningtyas, K. P. (2022). Economics and Development Analysis. *Inspire Journal: Economics and Development Analysis*, 2, No. 1, 1–12.
- Purwanto, L. L. & B. (2014). Ekonomi Maritim & Sumber Daya Manusia Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi ...*, August, 372–389. https://scholar.archive.org/work/ngmrwnpvrvgorje5zd6urwrwhy/access/wayback/http://library.stm-trisakti.ac.id/jurnal/index.php/JMBTL/article/viewFile/65/pdf_43
- Saddington, L. (2023). Geopolitical imaginaries in climate and ocean governance: Seychelles and the Blue Economy. *Geoforum*, 139(October 2021), 103682. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2023.103682>
- Sahi, N. A. (1945). *Pemantapan Pelaksanaan Pembangunan di Desa*.
- Shinta Iffah Rosyidah. (2022). Analisis Potensi Sektor Ekonomi Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi*, 27(3), 296–316. <https://doi.org/10.24912/je.v27i3.1111>
- Stiglitz, G. M. M. and Joseph E. (2000). *Frontiers of Development Economics* (Issue December).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Waruwu, S. J. A. (2016). *INVESTASI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 1995 – 2014 SKRIPSI ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI , INVESTASI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 1995 – 2014*.
- Zulkifli, Nurjannah, I., Usman, & Mokodompit, E. A. (2023). Implikasi Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Pengembangan Ekonomi Maritim. *OSF Preprints*, 1–15. <https://osf.io/nps2v>
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2022. *Pertumbuhan Ekonomi Banten Triwulan ke IV Tahun 2022*. Pemerintahan Provinsi Banten: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2022. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan ke IV Tahun 2022*. Pemerintahan Republik Indonesia: Badan Pusat Statistik
- BSILHK. (2022, Oktober 27). PEMSEA-PNLG 2022: Menteri LHK Dorong Pertumbuhan Dan Kelestarian Lingkungan Ekonomi Biru. Diambil kembali dari BSILHK: <https://bsilhk.menlhk.go.id/index.php/2022/10/27/pemsea-pnlg-2022-menteri-lhk-dorong-pertumbuhan-dan-kelestarian-lingkungan-ekonomi-biru/>
- Direktorat Statistik Distribusi. (2021, November 29). *Statistik Transportasi Laut 2020*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=MjAyMzI1ZjE3OTU1ODk1NmRlMmQzMmFk&xzm n=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzlwMjEvMTEvMjAyMzI1ZjE3OTU1ODk1NmRlMmQzMmFkL3N0YXRpc3Rpay10cmFuc3BvcnRhc2ktbGF1dC0yMDIwLmh0bWw%3D&twoadfnoarfe a>